



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 JAKARTA 10110 TROMOL POS NOMOR 1020
TELEPON (021) 3843348,3810350,3457661 FAKSIMILE 3810361

Nomor : 301 /SEK/KU.01/10/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemotongan Pajak Penghasilan

31 Oktober 2016

Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal pada Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Badan pada Mahkamah Agung RI

di

Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 dan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu Nomor S-13894/WPJ.06/KP.01/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Penegasan Mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Uang saku rapat diluar jam kantor disesuaikan dengan PMK Nomor 117/PMK.02/2016 dan dikenakan PPh Pasal 21 final;
2. Imbalan sehubungan dengan jasa atas kegiatan Paket Meeting (*Fullboard*, *Fullday* dan *Halfday*) yang diadakan di hotel dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto;
3. Kegiatan Paket Meeting (*Fullboard*) yang diadakan di Badan Diklat Mahkamah Agung RI tidak dikenakan PPh Pasal 23 sepanjang dalam kegiatan tersebut tidak terdapat pembayaran jasa oleh bendahara pemerintah kepada pihak lain / rekanan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
4. Ketentuan tersebut mulai berlaku tanggal 1 November 2016.

Demikian agar Saudara dapat memerintahkan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud.

Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Pt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. Drs. ACO NUR, M.H.
NIP. 19630313 198903 1 021

Tembusan :

1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.